

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Dhea Arista¹, Sifa Ulfa Ziah², Idel Eprianto³, Cris Kuntandi⁴, Rachmat Pramukty⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponding Author: dhearista29@gmail.com¹

Article History

Received : 27-06-2023

Revised : 03-07-2023

Accepted : 07-07-2023

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Keywords: Government Internal Control System Government Internal Control System; Human Resources Competence Government Accounting Standards; Quality of Government Financial Statements

ABSTRAK

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara/daerah selama kurun waktu tertentu. Arah atau tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berkualitas agar berguna bagi para pemakainya. Artikel ini mereview beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah (y) sebagai variabel dependen, dan standar akuntansi pemerintah (x1), kompetensi sumber daya manusia (x2) dan sistem pengendalian internal pemerintah (x3) sebagai variabel independen. Tujuan penulisan artikel ini untuk membangun hipotesis pengaruh antar variabel agar dapat dimanfaatkan dan digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel standar akuntansi pemerintah (x1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah variabel (y), dan ada pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia (x2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah variabel (y), dan ada pengaruh variabel sistem pengendalian internal pemerintah (x3) terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah (y).

ABSTRACT

Financial statements are a form of accountability for state/regional financial management for a certain period of time. The direction or purpose of financial statements is to provide quality information to be useful for users. This article reviews several factors that affect the quality of government financial statements (y) as dependent variables, and government accounting standards (x1), human resource competence (x2) and government internal control systems (x3) as independent variables. The purpose of writing this article is to build a hypothesis of influence between variables so that it can be used and used in future research. The results of the literature review article that the author has done show that there is an influence of government accounting standard variables (x1) on the quality of government financial statements variable (y), and there is an influence of human resource competence variables (x2) on the quality of

government financial statements variable (y), and there is an influence of government internal control system variables (x3) on government financial statement quality variables (y).

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan suatu syarat standar yang harus dilaksanakan mengenai informasi akuntansi dan dalam menyusun sebuah laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang menciptakan informasi yang berguna bagi para peguna laporan keuangan. laporan keuangan sendiri mencerminkan apakah sebuah pemerintah telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan relevan. Relevan sendiri memiliki arti bahwa laporan keuangan harus berisi informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna dengan memungkinkan mereka menilai peristiwa pada masa lalu atau saat ini dan memprediksi masa depan.

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP tersebut masih menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusianya, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusianya. Dalam hal ini, keahlian staf memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan setiap unit. Kompetensi merupakan dasar bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan tidak dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien dan ekonomis. Dalam hal ini, pekerjaan yang dilakukan tidak akan datang tepat waktu, membuang-buang waktu dan tenaga. Keahlian staf menghemat waktu saat menyiapkan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan SDM tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hal-hal yang perlu dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat tepat waktu.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengevaluasi penyelenggaraan APBN, katanya Badan Pengendali Tertinggi (BPK RI) memeriksa dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kualitas penyajian informasi pelaporan keuangan lembaga. Hal ini dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akan datang, untuk menginformasikan hasil pelaksanaan APBN kepada masyarakat, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan

APBN, dan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap komitmen pelaksanaan. Dalam Laporan Tahunan Negara (LKPP) 2019, Kantor Pemeriksa mengidentifikasi 13 isu di LKPP. BPK telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan baik dalam sistem pengendalian intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan yang harus dipenuhi. Temuan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan serta temuan permasalahan terkait laporan keuangan yang disusun Direksi tidak didukung oleh standar akuntansi.

Atas hal tersebut penulis melakukan literatur review untuk mengulas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada sektor publik. Dari beberapa penelitian yang berbentuk jurnal, penulis menemukan 3 (tiga) faktor yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Y), yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3), ketiga faktor tersebut memiliki keterkaitan sebagai faktor faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Kualitas adalah tujuan yang sulit dipahami (tujuan yang sulit dipahami), karena harapan para konsumen akan selalu berubah. Setiap standar baru ditemukan, maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik. Dalam pandangan ini, kualitas adalah proses dan bukan hasil akhir (meningkatkan kualitas kontinuitas) (Kadir 2001:19). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa mutu adalah penilaian terhadap aktivitas pusat tanggung jawab terhadap suatu hal tertentu, baik dilihat dari segi material. Laporan keuangan sektor publik merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada pada suatu instansi yang dijadikan sebagai informasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi (Rasdianto, dkk : 2013).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu Baridwan (2000) juga mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut “Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan”. Kualitas Informasi yang harus ada dalam laporan keuangan sektor publik menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah dapat dipahami (understandability), relevansi (relevance), keterandalan (reliable) dan dapat diperbandingkan (comparability).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga menyatakan bahwa dalam melaksanakan standar akuntansi keuangan, instansi pemerintah harus membentuk unit akuntansi dalam organisasinya. Unit akuntansi yang dimaksud bertugas menjalankan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan yang

dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah". Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Menurut Singkali & Widuri : 2014).

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut (PP 71, 2010), tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan "bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan". Laporan keuangan pemerintah dirancang untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan dan kebutuhan khusus pengguna. Kualitas laporan keuangan Dewan Negara dievaluasi setiap tahun dalam bentuk opini oleh Badan Pengendali Keuangan (BPK). Pernyataan tersebut merupakan opini profesional auditor tentang keakuratan laporan keuangan. Opini BPK didasarkan pada standar pemeriksaan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pernyataan tentang kebenaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan negara.

Menurut Halim (2012) Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami Informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan.

Ketika standar akuntansi pemerintah (SAP) dapat membantu memantau sumber daya manusia atau peralatan daerah saat menyiapkan laporan meningkatkan efisiensi keuangan dan meminimalkan kemungkinan efek negatif dalam bentuk keandalan yang buruk informasi keuangan.

Di dalam (undang-undang no.13 tahun 2013) menerangkan mengenai kompetensi, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan, hal tersebut mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang sesuai dengan standar. Sedangkan Kompetensi menurut (Suparno) adalah sebuah kecakapan yang memadai dalam melakukan setiap tugas. Bisa juga disebutkan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan dan kecakapan sesuai yang disyaratkan oleh pihak tertentu.

Kata dasarnya sendiri adalah kompeten, artinya mampu, terampil. Kompetensi adalah kualitas/sifat seseorang yang membuatnya berhasil dalam bekerja. Menurut (Stephen Robbin)

arti kompetensi sebagai suatu kemampuan atau keterampilan. Dapat disebut juga kapasitas seseorang dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan yang diberikan. Dimana kemampuan diukur dengan 2 faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dari berbagai pendapat yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi itu ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki seseorang, terutama karyawan, untuk mencapainya tingkat pekerja terampil.

Menurut (Van Looy, Van Dierdonck, dan Gemmel) arti kompetensi merupakan karakteristik manusia yang memiliki keterkaitan erat dengan performa dan kualitas seseorang. Hal tersebut menyangkut keterampilan dalam bertindak serta dalam berperilaku. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat diuraikan bahwa kompetensi SDM adalah kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Menurut Mulyadi (2016), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Keputusan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pemerintahan pelatihan sebagai satu kesatuan proses tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajer dan seluruh karyawan untuk memberikan jaminan yang wajar dalam mencapai tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset pemerintah dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selain itu, sistem pengendalian intern negara merupakan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah.

SPIP terdiri dari beberapa elemen, pertama control environment. Administrator Instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan kontrol yang stabil menimbulkan perilaku yang positif dan menguntungkan pada saat mengimplementasikan SPI di lingkungan kerja. Tindakan ini dirancang untuk mempromosikan kejujuran dan nilai-nilai etika; ikatan yang kompeten; kepemimpinan yang mendukung; pembentukan struktur organisasi yang memenuhi kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang baik; perwujudan peran efektif aparatur pengawasan intern pemerintah; dan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Komponen lain dari pengendalian internal adalah penilaian risiko. Tugas beresiko dimulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan konsisten bagi instansi pemerintah, baik di tingkat instansi maupun operasional. Selain itu, instansi pemerintah secara efektif mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik di dalam maupun di luar instansi. Risiko yang teridentifikasi dianalisis dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan ditentukan. Instansi pemerintah mengartikulasikan pendekatan manajemen risiko dan tindakan manajemen risiko yang diperlukan untuk memitigasi risiko. Berdasarkan

pengertian sistem pengendalian intern menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern adalah suatu proses pengendalian yang dikaitkan dengan aktivitas dan aktivitas manajemen perusahaan dan seluruh karyawan serta tidak bersifat acak dan tanggap terhadap kasus tertentu, melainkan berkesinambungan.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Author (tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1.	Saefani Nur Hanifah, Cris Kuntadi, Rachmat Pramukty (2023)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
2.	Lilis Setyowati, Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi (2016)	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Semarang	Komptensi Sumber Daya Manusia Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan	Peran Teknologi Informasi, Peran Internal Audit Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan
3.	Siska Yulia Defitri (2018)	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tidak ada	Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4.	Putriasri Pujanira, Abdullah Taman (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY
5.	Khoer, I. M., & Atnawi, A. (2022)	Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Laporan Keuangan Desa	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Tidak ada
6.	Kadek Desiana Wati, Nyoman	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia,	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia,	sistem akuntansi keuangan daerah

	Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)	penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah	terhadap kualitas laporan keuangan daerah
--	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

METODE PENELITIAN

Pada penelitian artikel ilmiah ini metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif dan kajian Pustaka (**Library Research**). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *Offline* di perpustakaan dan baik secara *Online* yang bersumber berasal dari **Scholar Google** dan baik dari media lainnya.

Penelitian kualitatif ini memiliki kajian pustaka yang digunakan secara konsisten. Artinya bahwa penelitian kualitatif ini adalah sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami kejadian tentang apa yang terjadi secara alami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persensi, dan motivasi. Melakukan tindakan dan lainnya secara hilostic dan dengan cara melakukan diskripsi dalam bentuk kata kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan berikut pembahasan artikel *literature riview* ini atas konsentrasi tata Kelola perusahaan:

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017), menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014), menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan penelitian Saefani Nur Hanifah (2023), menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya Sumber daya manusia yang berkualitas adalah mereka yang memiliki semangat kerja yang baik, kemampuan untuk memahami bidangnya masing-masing (profesionalisme), pengetahuan, kemampuan dan keterampilan perencanaan / pengorganisasian yang dimiliki oleh sumber daya manusia.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lilis Setyowati, Wikan Isthika dan Ririh Dian Pratiwi (2016), menyatakan bahwa Sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan pemerintah. Kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Di dukung oleh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017), menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Persamaan tersebut memiliki arti bahwa nilai koefisien Kompetensi Sumber Daya Manusia mempunyai nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan.

Begitu pun dengan berdasarkan penelitian Khoer dan Atnawi (2022), terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kecamatan Pabuaran. Artinya bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki SKPD, maka akan semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

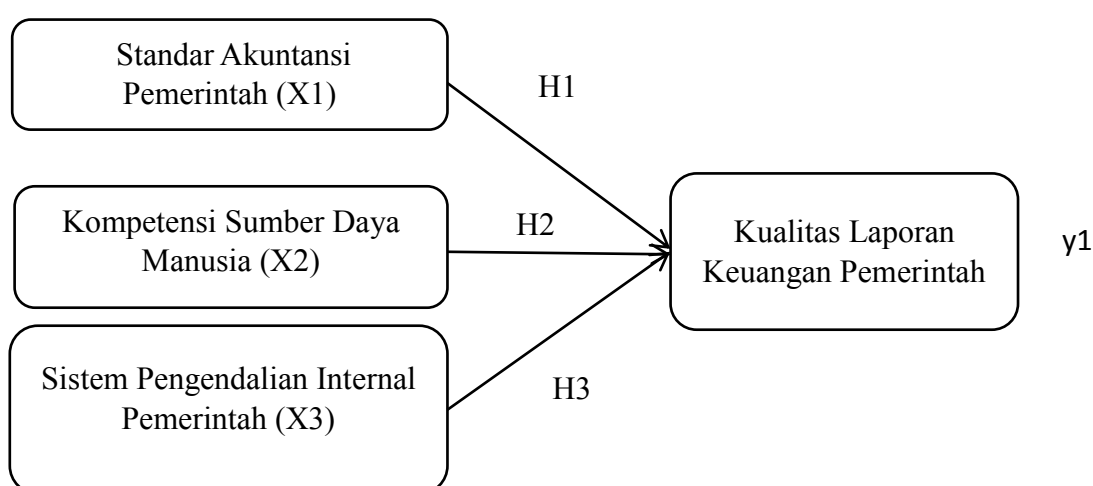
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan penelitian Khoer dan Atnawi (2022), terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sistem Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kecamatan Pabuaran. Artinya bahwa semakin baik

Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki SKPD, maka akan semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Artikel ini menguraikan pengaruh antara standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan rumusan masalah, pembahasan pengaruh antar variabel yang diperoleh dari literatur jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan terkait variabel yang dianalisis, maka diperoleh kerangka berpikir artikel ini sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Konseptual

H1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah H2. Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

H3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, maka disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (x1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (x2) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (x3) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tinjauan literatur, terlihat bahwa Standar Akuntansi pemerintahan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi

pemerintahan memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standar akuntansi pemerintahan adalah standar yang memastikan bahwa laporan keuangan disusun untuk memenuhi persyaratan informasi keuangan yang berguna bagi penggunaannya. Informasi yang berguna adalah bukti bahwa laporan keuangan memenuhi persyaratan informasi. Selain itu, sistem pengendalian internal Dewan Manajemen mempengaruhi kualitas laporan keuangan tahunan. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan properti pemerintah, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kompetensi pribadi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan adalah produk dari industri akuntansi. Oleh karena itu, karyawan yang kompeten diperlukan untuk persiapan dan produksi laporan keuangan berkualitas tinggi. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan staf yang memahami akuntansi pemerintah dan organisasi pemerintah serta memenuhi syarat untuk mengimplementasikannya.

Penelitian selanjutnya dapat meneliti variabel bebas lainnya mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah sebagai variabel Penggunaan teknologi informasi, komitmen organisasi dan tata kelola yang baik. Selain itu, sumber literatur yang digunakan sebagai referensi saat penulisan artikel ini juga terbatas. Penelitian selanjutnya bertujuan untuk menggunakan sumber literatur yang semakin beragam dan melakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada beberapa responden sehingga diketahui kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, I., Sulistyawati, A. I., & Nugroho, A. H. (2022). MENAKAR KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI FAKTOR-FAKTOR PENENTUNYA (Studi Empiris pada SKPD di Kota Semarang). 1-11.
- Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati. (2014). "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol 2 No. 1.
- Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati. (2014). "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol 2 No. 1.
- Khoer, I. M., & Atnawi, A. 2022. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Laporan Keuangan Desa. Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman, 9 (1), 12-23.

- Kusnadi, A., Oemar, F., & Supeno, B. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1 (1), 51-63.
- Kusumah, Arif Ardi. 2012. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Accounting*. Vol 1, No. 1.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), pp. 1-17
- Mulyadi. (2007). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. 2016. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). *Journal of Accounting*, 2 (2).
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Auditing, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Graha Ilmu; Jakarta.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaa Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- Ropiyantie, Devi. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Accounting*. Vol 1, No. 1.
- Roviyantie, D. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Journal.Unsil.ac.id*, (2), 1–27.
- Yuliani, S. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 3 (2), pp. 206-220
- Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 3(2), 2–17